



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TH. 2023



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dapat terselesaikan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam SAKIP keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat atas penggunaan anggaran pemerintah dan bukan hanya dari realisasi anggaran.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung selama tahun 2023 yang transparan dan akuntabel disusunlah Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023. Hal ini untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mempunyai komitmen dalam melaksanakan target kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil baik output maupun outcome, penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebagai salah satu implementasi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan good governance. serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan dari Visi Daerah yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tahun 2023 belum tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Hal ini dikarenakan adanya cuaca ekstrem yang menaikkan angka kejadian bencana dimana karena faktor keminiman Dokumen Kajian Resiko Bencana sehingga penghitungan daerah rawan bencana yang menjadi salah satu tolok ukur penghitungan daerah rawan bencana masih menggunakan data daerah/wilayah yang sering terjadi bencana. Sedangkan untuk

capaian / realisasasi anggaran juga tidak tercapai 100% karena pada Anggaran Perubahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendapatkan Anggaran dari Dana Insentif Daerah (DID) yang tidak memungkinkan untuk dibelanjakan karena waktu yang sangat terbatas..

Dengan laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun pelaksanaannya. Hasil pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tidak terlepas dari kerjasama semua pihak dimulai dari perumusan kebijakan, sampai dengan implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023

Temanggung Februari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,


TOEHR HADI WURYANTO, SE, M.Si
Rembina Tk.I
NIP: 197107281997031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
	Hal

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
1. Latar Belakang	1
2. Tugas dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi	2
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung	7
5. Isu Strategis	16
B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP	16
1. Dasar Hukum	16
2. Tujuan LKjIP	17
3. Manfaat LKjIP	18
C. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	18

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS.....	20
1. Visi Daerah	20
2. Misi Daerah	21
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program BPBD	23
B. TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM BPBD	24
C. INDIKATOR UTAMA BPBD	
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	25
E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023	26

BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	32
	A. CAPAIAN KINERJA	32
	ORGANISASI.....	34
	1. Capaian Indikator Kinerja Utama	45
	2. Capaian Indikator Kinerja Program	
	B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	51
	C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN.....	54
BAB IV	PENUTUP	
	A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BPBD	56
	B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG	56

LAMPIRAN - LAMPIRAN

- A. Perjanjian Kinerja 2023
- B. RENCANA AKSI 2024
- C. RKT 2025
- D. Pohon Kinerja

DAFTAR TABEL

			Hal.
Tabel	1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan	7
Tabel	1.2	Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2023	8
Tabel	2.1	Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran BPBD Kabupaten Temanggung	24
	2.2	Matrik keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran	24
	2.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung	25
	2.4	Program yang mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran	25
	2.5	Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	26
	2.6	Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2023	27
	2.7	Belanja Program / Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2023	28
	3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	33
	3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama	34
	3.3	Klasifikasi Kelas Risiko Bencana dari BNPB	38
	3.4	Perhitungan Indek Risiko Bencana Kabupaten dengan Provinsi Jawa Tengah atas Analisa BNPB	38
	3-5	Data Kejadian Bencana Kabupaten Temanggung Tahun 2023	39
	3.6	Faktor Pendorong ,Penghambat dan Tindak Lanjut Tercapainya Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Temanggung	44
	3.7	Capaian Indikator Sasaran Strategis 2023	45
	3.8	Capaian Indikator Kinerja Program Penanggulangan Bencana 2023	47
	3.9	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	48

3.10	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.....	49
3.11	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi	50
3.12	Faktor penghambat, faktor pendorong dan tindak lanjut.....	52
3.13	Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023	53
3.14	Prestasi dan penghargaan Tahun 2023	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Temanggung	3
Gambar	2.2	Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.....	29
Gambar	2.3	Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.....	29
Gambar	2.4	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan.....	29
Gambar	2.5	Sistem Informasi Kinerja ASN.....	30
Gambar	2.6	Sistem Informasi Kepegawaian.....	30
Gambar	3.1	Grafik Indek Risiko Bencana Kabupaten Temanggung	37
Gambar	3.2	Grafik Kejadian Bencana Kabupaten Temanggung	40
Gambar	3.3	Penyusunan Peta Risiko Bahaya dan Kerentanan Kabupaten Temanggung Tahun 2023	41
Gambar	3.4	Sekolah Kebencanaan	41
Gambar	3.5	Pelatihan Gabungan personil penanganan bencana	42
Gambar	3.6	Koordinasi Lintas Sektor dan Stakeholder Terkait	43
Gambar	3.7	Penerimaan piagam penghargaan Juara tervaforit Lomba yel-yel dalam dalam rangka Bulan Peringatan Risiko Bencana di Kendari Sulawesi Tenggara	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (BPBD) selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi BPBD sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana.

Selain dari hal tersebut penyusunan LKjIP adalah sebagai salah satu upaya menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi harus bersinergi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Penyusunan LKjIP BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian

kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Temanggung merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanggulangan bencana daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011).

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa BPBD Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3. Susunan Organisasi

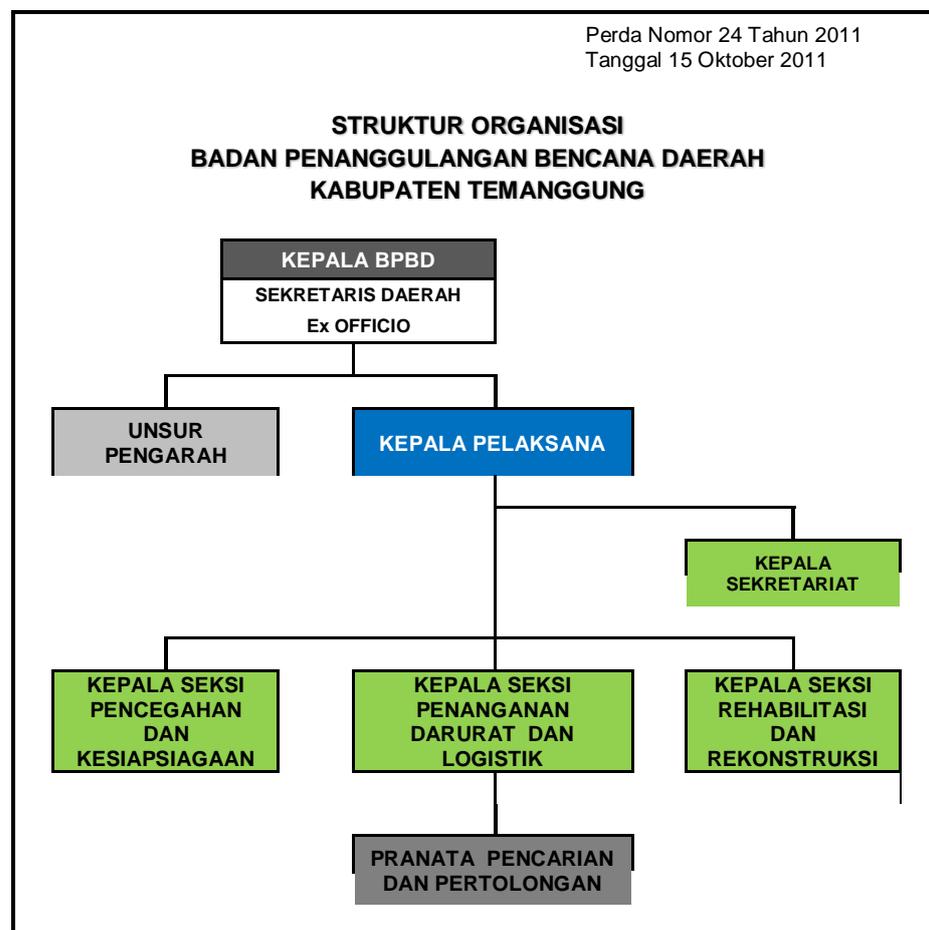
Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, maka dibentuk struktur organisasi BPBD Kabupaten Temanggung, yang terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana; dan
- c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

Susunan organisasi unsur pelaksana terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat;
3. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
4. Seksi Penanganan Darurat dan Logistik; dan
5. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Struktur organisasi unsur Pelaksana BPBD sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai mana berikut:



*Gambar 1.1.
Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD
Kabupaten Temanggung*

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Temanggung di atas dapat diuraikan dan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala BPBD mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

2. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

3. Unsur Pelaksana

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana sebagaimana berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi :

- a. **koordinasi** penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. **komando** penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. **pelaksana** penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2) Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD yang meliputi penyusunan program, administrasi keuangan, pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan perencanaan dan pelaporan program;
- b. penyusunan, pengolahan, dan pelayanan data;
- c. pengelolaan urusan keuangan;
- d. pengelolaan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi-seksi sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

4) Seksi Penanganan Darurat Dan Logistik

Seksi Penanganan Darurat Dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi penanganan Darurat Dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- c. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, serta pemberian dukungan logistik dan peralatan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum penanggulangan bencana pada pasca bencana; di bidang
- c. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. pemantatran, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Dukungan sumber daya manusia (SDM) dan sarana-prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Kepegawaian

Tabel 1.1
Jumlah, Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan

No	Jabatan	Jumlah												Ket
		Jenis Kelamin		Kualifikasi Pendidikan						Golongan				
		L	P	S.2	S.1	D.3	SMA	SMK	SD	IV	III	II	I	
1	2	3		4						5				6
I	ASN													
1	Struktural	3	2	1	4					1	4			
2	JFT	2	1			3						3		
3	JFU	4					3	1			1	2	1	
4	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)	8	4				12					12		P3K (Setara Gol II/a)
	JUMLAH	17	7	1	4	3	15	1		1	5	17	1	
II	Non ASN													
5	(Satgas PB)	6	1				7							
7	Non ASN T. Keamanan & T.Kebersihan	9					8	1						
	JUMLAH	15	1				15	1						

Sumber Data : Subag Umpeg BPBD

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung 50% dari ASN 50% dari Non ASN (Suporting Staf), adapun perician sesuai dengan kualifikasi sebagai berikut:

1) Persentase sumber daya aparatur ASN dari keseluruhan pegawai

1.1 Jumlah Pegawai berdasar Jenis Kelamin

80% laki-laki dan 20% Perempuan

1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Sarjana (S.2), 2,5%, Sarjana (S.1), 15%, Diploma (D.3) 10%,
SLTA 70%, SLTP 2,5%

1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Golongan IV 2,5%, Golongan III 12,5%, Golongan II terdiri yang
dari ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(P3K) 42,5% dan Golongan I, 2,5%

2) Sumber Daya aparatur Non ASN

Sumber daya aparatur / pegawai non ASN di Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Temanggung sebanyak 16 orang terdiri
dari 7 orang Satgas Penanggulangan Bencana, 6 Orang Petugas
keamanan, dan 3 orang petugas kebersihan.

b. Sarana dan Prasarana :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

No	Nama Barang	Merk/Tipe	JML	Satuan	Cara Perolehan
1	2	3	4	5	6
	PERALATAN DAN MESIN		416	unit	
	MESIN PROSES		2	unit	
1	Water Treatment (Mesin Proses)	BNPB/Mini Portable	2	unit	Hibah BNPB
	ALAT BANTU		19	unit	
	ELECTRIC GENERATING SET		4	unit	
1	Portable Generating Set	Mitsubishi	2	unit	Dr Kesbang (bakornas PB)
2	Portable Generating Set	Genset Honda	2	unit	Hibah BNPB
	POMPA		2	unit	
1	Pompa Air	Pompa Air Honda /WB20XH	2	unit	Hibah BNPB
	EQUIPMENT/ALAT BANTU		1	unit	
1	Flood Light	Lampu Senter /Polarion PS-PH40/ HID Searchlight	1	unit	Hibah BNPB
	PERLENGKAPAN KEBAKARAN HUTAN		8	unit	
1	Full Body Harness	Petzi /Newton	1	unit	APBD

No	Nama Barang	Merk/Tipe	JML	Satuan	Cara Perolehan
1	2	3	4	5	6
2	Ascender	Petzl /-	2	unit	APBD
3	Perlengkapan Rescue	Peralatan SAR /-	1	unit	APBD
4	Perlengkapan Rescue	campuran /campuran	1	unit	APBD
5	Perlengkapan Rescue	IST /-	2	unit	APBD
6	Perlengkapan Rescue	Auroteam /full body	1	unit	APBD
	PERALATAN SELAM		5	unit	
1	Sepatu Karang	DIVE & FREEDIVE/ SHORT BOOT ZEPRO	5	unit	APBD
	PERALATAN SAR MOUNTENERING		4	unit	
1	Pulley	Petzl /-	2	unit	APBD
2	Tandu Lipat	Stretcher /YDC 8 A1	1	unit	APBD
3	Tandu Lipat	Smico /Tandu Lipat	1	unit	APBD
2	ALAT ANGKUTAN		30	unit	
	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR		18	unit	
	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN		3	unit	
1	Station Wagon	Toyota/KF70	1	unit	Dropping Bag Umum
2	Station Wagon	Toyota Kijang/STD LG/KF80	1	unit	Bagian Umum
3	Station Wagon	TOYOTA/F651RM	1	unit	ANTAR SKPD
	KEND BERMOTOR ANGKUTAN BARANG		3	unit	
1	Pick Up	Mitsubishi Strada Triton GLS/Double Cabin	1	unit	Hibah BNPB
2	Pick Up	TOYOTA/HILUX	1	unit	APBD
3	Pick Up	Mitsubishi/Pickup	1	unit	Hibah BNPB
	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA		9	unit	
1	Sepeda Motor	Honda/Megapro	2	unit	Kesbang/ APBD
2	Sepeda Motor	Kawasaki/KLX 150 S	2	unit	Hibah BNPB
3	Sepeda Motor	Kawasaki /LX 150C (KLX150S)/KLX	4	unit	Hibah BNPB
4	Sepeda Motor	Yamaha/B3B A/T	1	unit	APBD
	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS		3	unit	
1	Mobil Ambulance	Toyota/Short 3700	1	unit	Mutasi RSUD
2	Mobil Tangki Air	ISUZU/NKR71HDE2-2	1	unit	Hibah BNPB
3	Mobil Tangki Air	HINO 130 HD/130 HD	1	unit	APBD
	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR		9	unit	
	KENDARAAN TAK BERMOTOR ANGKUTAN BARANG		9	unit	
1	Gerobak Dorong	ARTCO/HS-600.6CF	8	unit	APBD

No	Nama Barang	Merk/Tipe	JML	Satuan	Cara Perolehan
1	2	3	4	5	6
2	Baggage Trolley	krisbow/black janitor cart w/color	1	unit	APBD
	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR		1	unit	
	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR UNTUK BARANG		1	unit	
1	Kapal Motor	Slinger/Tohatsu Everrun/18K	1	unit	Hibah BNPB
	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR		2	unit	
	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR KHUSUS		2	unit	
1	Perahu Karet (Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Khusus)	Lokal/RB.390	2	unit	APBD
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		15	unit	
	ALAT BENGKEL BERMESIN		14	unit	
	PERKAKAS BENGKEL KAYU		14	unit	
1	Mesin Gergaji	Cain Saw Ouromatic-F/Zenso	1	unit	Dari Kesbang
2	Mesin Gergaji	SBH/MS 381 /MS.381	2	unit	APBD
3	Mesin Gergaji	NEW WEST /NEW WEST 588X	9	unit	APBD 2022
4	Mesin Gergaji	STHIL /MS210,230,250	2	unit	APBD
	ALAT UKUR		1	unit	
	ALAT UKUR UNIVERSAL		1	unit	
1	Global Positioning System	Garmin /64S	1	unit	APBD
	ALAT PERTANIAN		15	unit	
	ALAT PENGOLAHAN		15	unit	
1	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK		15	unit	
1	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	MENT /KNAPSACK ELEKTRIK SPRAYER	4	unit	BTT
2	Penyemprot Otomatis (Automatic Sprayer)	BOOSTER /KNAPSACK ELEKTRIK SPRAYER	11	unit	BTT
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		111	unit	
	ALAT KANTOR		24	unit	
	MESIN KETIK		2	unit	
1	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	brother /GX-6750	2	unit	APBD
	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR		19	unit	
1	Lemari Besi/Metal	Brother /Pintu buka	4	unit	APBD
2	Peti Uang/Cash Box/ Coin Box	- /-	1	unit	APBD
3	Lemari Kayu	2 Pintu /-	2	unit	APBD

No	Nama Barang	Merk/Tipe	JML	Satuan	Cara Perolehan
1	2	3	4	5	6
4	Lemari Kayu	- /-	1	unit	APBD
5	Rak Besi	Panjang /-	3	unit	APBD
6	Filing Cabinet Besi	Brother /B-104	6	unit	APBD
7	Locker	IMPORTA /LC 6P	2	unit	APBD
ALAT KANTOR LAINNYA			3	unit	
1	Alat Penghancur Kertas	Gemet /1000C	1	unit	APBD
2	LCD Projector/Infocus	LCD SONY /VDL DX 140	1	unit	APBD
3	LCD Projector/Infocus	Epson EB-X400	1	unit	APBD
ALAT RUMAH TANGGA			70	unit	
MEUBELAIR			26	unit	
1	Kursi Besi/Metal	- /-	8	unit	APBD
2	Meja Rapat	- /-	1	unit	APBD
3	Meja Rapat	EXPO /M140	2	unit	APBD
4	Tempat Tidur Besi	Veldbed /-	8	unit	Hibah BNPB
5	Meja Resepsionis	EXPO /MODEL LENGKUNG 1,5 LINGKARAN	1	unit	APBD
6	Kursi Fiber Glas/Plastik	Lufo /-	1	unit	Dari Kesbang
7	Kursi Fiber Glas/Plastik	Fatoni /-	4	unit	APBD
8	Kursi Tamu	KAYU KAYU /2-1-1-1	1	unit	APBD
ALAT PEMBERSIH			4	unit	
1	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	Krisbow /10100236	1	unit	APBD
2	Mesin Pemotong Rumput	STEALL /PANGGUL	1	unit	BTT
3	Mesin Cuci	POLYTRON /PAW- 80518 B ITB 982880, A 00120	1	unit	BTT
4	Mesin Cuci	POLYTRON /PAW- 80518	1	unit	BTT
ALAT PENDINGIN			1	unit	
1	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	POLYTRON /PRX 212N	1	unit	APBD
ALAT DAPUR			19	unit	
1	Kompas Gas (Alat Dapur)	RINAI /R1-522C	1	unit	BTT
2	Treng Air/Tandon Air	LOBSTER TORN /CUCI TANGAN PORTABLE	2	unit	BTT
3	Treng Air/Tandon Air	TANGKI PE LOBSTER LO 110 /LO 110	16	unit	APBD
ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)			20	unit	
1	Televisi	LG	1	unit	APBD
2	Televisi	SAMSUNG /TU 7000	4	unit	BTT
3	Televisi	POLYTRON /PLD4381550	1	unit	APBD
4	Televisi	LG /LM 57SMART	2	unit	APBD
5	Loudspeaker	HERTZ /MAX 110 HE	1	unit	BTT
6	Sound System	Avino	1	unit	APBD
7	Wireless	PASLINE /PW 8808 B	1	unit	BTT
8	Megaphone	TOA /ZR 2015 S	2	unit	BTT
9	Microphone Floor Stand	CRIMSON /CR-106 H	1	unit	BTT
10	Unit Power Supply	Prolink	1	unit	APBD
11	Camera Video	GOPRO /GOPROHERO 5	1	unit	APBD

No	Nama Barang	Merk/Tipe	JML	Satuan	Cara Perolehan
1	2	3	4	5	6
12	Water Filter	Varem Maxivarem, Binrun 100 Psi, Genset Honda 2200 watt)	1	unit	Hibah BNPB
13	Tangga Aluminium	Krisbow /Ladder step with handle	1	unit	APBD
14	Dispenser	ARISA /KABINET EXTRA BESAR	1	unit	BTT
15	Dispenser	ARISA /WD-1720 P	1	unit	BTT
	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT		17	unit	
	MEJA KERJA PEJABAT		10	unit	
1	Meja Kerja Pejabat Es III	- /-	1	unit	APBD
2	Meja Kerja Pejabat Es IV	- /-	4	unit	APBD
3	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	- /-	5	unit	APBD
	MEJA RAPAT PEJABAT		1	unit	
1	Meja Tamu Biasa	- /-	1	unit	APBD
	KURSI KERJA PEJABAT		6	unit	
1	Kursi Kerja Eselon III	Fatoni /-	1	unit	Droping Bag.Umum
2	Kursi Kerja Eselon IV	Big Star /-	5	unit	APBD
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		81	unit	
	ALAT STUDIO		31	unit	
	PERALATAN STUDIO AUDIO		4	unit	
1	Uninterruptible Power Supply (UPS)	PROLINK /UPS4Pc BX 650i MCPROLINK/PRO700SF C	2	unit	APBD
2	Uninterruptible Power Supply (UPS)	ICA /CE	1	unit	APBD
3	Uninterruptible Power Supply (UPS)	MONDOL 30A	1	unit	APBD
	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM		7	unit	
1	Camera Digital	Canon/Digital /-	1	unit	APBD
2	Camera Digital	sony /W830 Black	1	unit	APBD
3	Camera Digital	Nikon /S32/White	1	unit	APBD
4	LCD Monitor	DELL /LED	1	unit	APBD
5	LCD Monitor	DELL /LED20"ERO16HV	2	unit	APBD
6	LCD Monitor	SAMSUNG /LED	1	unit	APBD
	PERALATAN STUDIO PEMETAAN/PERALATAN UKUR TANAH		20	unit	
1	Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	Sipendil /Reservoir Tube PVC 2	20	unit	APBD
	ALAT KOMUNIKASI		44	unit	
	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE		41	unit	
1	Pesawat Telephone	- /-	1	unit	APBD
2	Telephone Mobile	SAMSUNG A 50	3	unit	APBD

No	Nama Barang	Merk/Tipe	JML	Satuan	Cara Perolehan
1	2	3	4	5	6
3	Telephone Mobile	REDMI /NOTE 8 PRO	1	unit	BTT
4	Telephone Mobile	SAMSUNG GALAXY M 10	2	unit	BTT
5	Handy Talky (HT)	Icom	1	unit	Hibah BNPB
6	Handy Talky (HT)	Yaesu /FT252	12	unit	APBD
7	Handy Talky (HT)	YAESU /VX - 3R	5	unit	APBD
8	Handy Talky (HT)	ALINCO /DJ-W58 MADE IN JAPAN	15	unit	APBD
9	Facsimile	Panasonic /-	1	unit	APBD
	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB		3	unit	
1	Unit Tranceiver Ssb Transportable	ICOM /IC 2300	3	unit	APBD
	PERALATAN PEMANCAR		6	unit	
	SWITCHER/MENARA ANTENA		5	unit	
1	Self Supporting Tower	TOWER TRIANGEL BESI ULIR SNI /BESI ULIR SNI	5	unit	APBD
	PERALATAN PEMANCAR DAN PENERIMA VHF		1	unit	
1	Unit Transceiver VHF Portable	RIG	1	unit	Hibah dari BNPB
	ALAT KEDOKTERAN		15	unit	
	ALAT KEDOKTERAN UMUM		13	unit	
1	Tensimeter	ABN /DIGITAL, DU 120	2	unit	BTT
2	Tabung 02	Lokal /Lokal	1	unit	APBD
3	Tabung 02	GC MEDICAL REGULATOR /YR 88	1	unit	BTT
4	Tabung 02	PURE AIR MEDICAL /GRADE AKL 20403021887	3	unit	APBD
5	Senter	FENIX /E35V3.0	6	unit	APBD
	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT		2	unit	
1	Emergency Kit	EMERGENCY FIRST AID	2	unit	APBD
	ALAT LABORATORIUM		11	unit	
	UNIT ALAT LABORATORIUM		1	unit	
	ALAT LABORATORIUM UMUM		1	unit	
1	Tripod	Tripod /-	1	unit	APBD
	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI		10	unit	
	ALAT LABORATORIUM TEKANAN DAN SUHU		10	unit	

No	Nama Barang	Merk/Tipe	JML	Satuan	Cara Perolehan
1	2	3	4	5	6
1	Thermometer Analog / Digital	SPC /TG 05	10	unit	BTT
	ALAT PERSENJATAAN		20	unit	
	PERSENJATAAN NON SENJATA API		14	unit	
	NON SENJATA API		11	unit	
1	Helmet	CONSINA EN 397 /AU-M02	5	unit	APBD
2	Helmet	PET2L /Type 1 Class C	6	unit	APBD
	ALAT NUKLIR, BIOLOGI DAN KIMIA		3	unit	
1	Pakaian Pelindung	SAFETY NOMEX III A /EN11612	3	unit	APBD
	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN		6	unit	
1.9	ALAT WANTEROR (PERLAWANAN TEROR)		6	unit	
1	Kacamata Pelindung	UVEX /PHEOS 9192445	6	unit	APBD
	KOMPUTER		39	unit	
	PERSONAL KOMPUTER		18	unit	
1	P.C Unit	IP Core 2 Duo, LG Simbada, Genius, Prolink	1	unit	APBD
2	P.C Unit	- /-	3	unit	APBD
3	P.C Unit	Asus /MB MH81ME DDR3 4 GB	1	unit	APBD
4	P.C Unit	Intel Prock 64560 Box,	2	unit	APBD
5	P.C Unit	Rakitan /AMD Ryzen 3 2200G	1	unit	APBD
6	P.C Unit	LG	3	unit	APBD
7	P.C Unit	PROCESSOR INTEL CORE /i5 9400	1	unit	BTT
8	P.C Unit	Core i5 4000,	1	unit	APBD
9	P.C Unit	Core i3 4170,	1	unit	APBD
10	Lap Top	Asus /-	1	unit	APBD
11	Lap Top	asus /X 455L	1	unit	APBD
12	Lap Top	ASUS-ROG G5131GT /PROESSOR CORE i5 9310H	1	unit	BTT
13	Note Book	LENOVO /CORE i3	1	unit	APBD
	PERALATAN KOMPUTER		21	unit	
	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER		19	unit	
1	Monitor	Acer	1	unit	APBD
2	Monitor	LG /LED	2	unit	APBD
3	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Printer Canon Laser Shoot LBP 6000/Canon /-	2	unit	APBD
4	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon /MP237	1	unit	APBD
5	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson-L120 /Injet	2	unit	APBD
6	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON /L-310	2	unit	APBD

No	Nama Barang	Merk/Tipe	JML	Satuan	Cara Perolehan
1	2	3	4	5	6
7	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON /L 120	1	unit	BTT
8	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON /L3110	2	unit	APBD
9	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON /L 3110 SCANNER	1	unit	BTT
10	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	BROTHER /DS620	1	unit	APBD
11	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	PLUSTEK /SMARTOFFICE PS283	1	unit	HIBAH DARI DINPUSIP
12	External/ Portable Hardisk	DELL /ext DD DELL 1 TB	1	unit	APBD
13	External/ Portable Hardisk	WD /ext DD WD 1TB Passport White 3.0	1	unit	APBD
14	External/ Portable Hardisk	Toshiba /External Hardisk	1	unit	APBD
PERALATAN JARINGAN			2	unit	
1	Acces Point	TP Link /TLWN722N	1	unit	APBD
2	Acces Point	TP Link /TLW801ND	1	unit	APBD
ALAT KESELAMATAN KERJA			50	unit	
ALAT PELINDUNG			5	unit	
TOPI KERJA			5	unit	
1	Helmet	Lokal /EN12492	5	unit	APBD
ALAT SAR			45	unit	
ALAT PENOLONG			30	unit	
1	Carabiner Besar	Petzl /M36A SL	9	unit	APBD
2	Carabiner Besar	PET2L /M33ASL	10	unit	APBD
3	Bright Descender	PET2L /PIRANA CLUB	5	unit	APBD
4	Back Pack/Ransel	/Tas	2	unit	Kesbang
	Back Pack/Ransel	Elcamino /-	4	unit	APBD
ALAT PENDUKUNG PENCARIAN			12	unit	
1	Tenda	Tenda Posko	1	unit	Hibah BNPB
2	Tenda	Tenda Keluarga	5	unit	Hibah BNPB
3	Tenda	Tenda Regu	3	unit	Hibah BNPB
4	Tenda	Tenda Pleton	2	unit	Hibah BNPB
5	Tenda	BNPB /Tenda Pengungsi	1	unit	Hibah BNPB
ALAT KERJA BAWAH AIR			3	unit	
1	Wet Suit	IST Tipe HOPPE	1	unit	APBD
2	Regulator	IST Prolint, Type R-750	1	unit	APBD
3	Tabung Udara dg K Valve (Luxfer AL 80 cft)	CHN	1	unit	APBD
RAMBU - RAMBU			8	unit	
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT			8	unit	
RAMBU TIDAK BERSUAR			8	unit	
1	Rambu Papan Tambahan	PAPAN PLAT /BESI	8	unit	APBD

5. Isu Strategis

Isu strategis yang di hadapi BPBD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1) Belum tersedianya Dokumen pokok Kebencanaan yang idealnya menjadi dokumen penanggulangan bencana di Kabupaten berupa dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB);
Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana, seperti membangun rumah di daerah rawan longsor, tidak melalui izin atau pertimbangan terkait risiko bencana yang mungkin terjadi sewaktu-waktu;
- 2) Masih tingginya ketergantungan masyarakat dalam penanganan bencana yang sebenarnya masih bisa tertangani sendiri oleh masyarakat;
- 3) Peningkatan kerusakan lingkungan seperti penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan, serta masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah di sungai.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan Perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja I nstansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman PenyusunanPelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 .

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;

- b. Sebagai salah satu acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan;
- c. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- d. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- e. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan LKjIP Kabupaten Temanggung Tahun 2021 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumberdaya manusia Perangkat Daerah, Kedudukan dan Fungsi Struktur Organisasi, Instrumen Pendukung Pengelolaan Kinerja serta isu strategis Perangkat Daerah.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung telah menyusun dokumen Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Tahun 2019 - 2023, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan Pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Tahun 2018-2023 .

Sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Temanggung, Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban untuk turut mensukseskan program pembangunan di daerah. Program Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1. Visi Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM,
MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata.
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. Misi Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya

adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tataruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bias bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu:

- 1) Kecepatan;
- 2) Ketepatan;
- 3) Keramahan, dan
- 4) Kenyamanan.

Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Tahun 2023 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2023 yang berfungsi sebagai media/wahana pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Kinerja BPBD Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mewujudkan Temanggung yang makin maju, mandiri, aman, adil, dan sejahtera untuk jangka menengah periode tahun 2019-2023 visi BPBD adalah:

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pelayanan Publik Yang Berkualitas.”

B. TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM BPBD

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan BPBD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Hubungan Antara Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran BPBD
Kabupaten Temanggung

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
No.	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana

Tabel 2.2
Matrik keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2023	KONDISI AKHIR 2022
1	2	3	4	5	6
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indek Resiko Bencana	angka	192,08	174,59

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA BPBD

Indikator Kinerja Utama BPBD Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
	Misi III (Ketiga) : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.	
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Indek Resiko Bencana

Program yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program yang mendukung
Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	1.1	Program Penanggulangan Bencana	BPBD

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2023 serta Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2023	Rumus
1.	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penanggulangan Bencana	Indek Resiko Bencana	192,08	$R = H \frac{V}{C}$ <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> R/H = Risk/Hazard = Resiko/ Ancaman V = Vulnerability = Kerentanan C = Capacity = Kemampuan (Penguasaan SDM/Kekuatan yg dimiliki masyarakat)

a. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di BPBD Daerah Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2023 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah

Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023

Tabel 2.6
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2022 (Rp)		
		Renstra	Renja	APBD
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	2.500.000.000	2.825.938.800	2.188.937.560

Sumber data: Dok Renstra, Renja dan Penjabaran APBD 2023

Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa anggaran tersebut belum termasuk anggaran ex BAU, dalam rangka pencapaian sasaran besaran anggaran yang secara keseluruhan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 4.165.541.004 (*empat milliard seratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu empat rupiah*) dengan komposisi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp. 4.038.585.644,- (*empat milliard tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus empat puluh empat rupiah*) dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 126.955.360,- (*seratus dua puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah*). Namun demikian besaran anggaran tersebut sudah melalui proses/mekanisme penganggaran yang dilakukan pada Bulan Oktober 2023 dengan adanya tahapan Perubahan anggaran, yang mana pada Badan Penanggulangan bencana Daerah mendapatkan penambahan dari Dana Insentif Daerah

(DID) Th Anggaran 2023. Adapun komposisi belanja langsung per program/ kegiatan yang menunjang sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tersaji dalam tabel 2.6 sebagai berikut:

Tabel 2. 7
Belanja Program / Kegiatan yang Menunjang Sasaran Strategis
Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran Penetapan	Anggaran Perubahan
1		3	4
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4.304.882.311	5.097.352.864
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.767.493.234	1.976.603.444
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.294.717.034	1.468.827.244
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.335.000	81.335.000
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.941.200	297.941.200
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.500.000	128.500.000
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	966.938.400	2.188.937.560
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000-	20.000.000-
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000	50.000.000
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	896.938.400	2.118.937.560

Dalam menunjang pencapaian Kinerja Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung menggunakan beberapa Aplikasi yang merupakan inovasi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam rangka peningkatan kinerja baik pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan dan kepegawaian antara lain:

1. E-Keuangan : Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik



Gambar 2.2
Sistem Integrasi Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Daerah

Sistem ini membantu dalam mengintegrasikan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis elektronik.

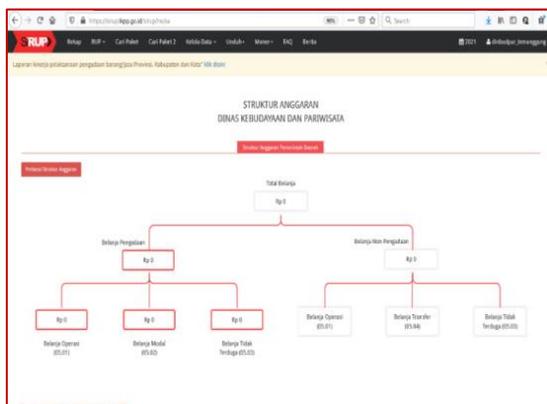
2. SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah



Gambar 2.3
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah menurut Permendagri Nomor 70 Th 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dikembangkan oleh Kemendagri dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, efisien dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

3. SiRUP : Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaa



Gambar 2.4
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan

SiRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis Web (Web based) yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP). SiRUP bertujuan untuk mempermudah

pihak PA/KPA dalam mengumumkan RUP-nya dan sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung Pengadaan Barang/Jasa secara Nasional.

4. E - KINERJA



Gambar 2.5
Sistem Informasi Kinerja Elektronik

Sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mencatat aktivitas harian ASN. Aplikasi ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja ASN yang outputnya akan

menentukan besaran tambahan penghasilan pegawai ASN.

5. SIMPEG

Sistem informasi yang digunakan untuk pelayanan kepegawaian



Gambar 2.7
Sistem Informasi Kinerja Elektronik

P2KP) dan E-File (Pengarsipan kepegawaian secara elektronik)

ASN yang terdiri dari layanan kepegawaian (Kenaikan gaji berkala, ijin cuti, penjaan pensiun & DPCP, daftar usulan pensiun serta input FPP), Layanan SKP (SKPD dan

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2023 merupakan laporan kinerja tahun ke 5 (lima) dari periodisasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung pada misi 2 (dua). Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- 1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}} \times 100$$

- 2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = Target – (Realisasi-Target) X 100

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran padatablel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja		Interpretasi
	Predikat	Nilai	
1	2	3	4
1	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	>0 – 30	Sangat kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil Persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai <0 % termasuk pada angka capaian kinerja

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung disajikan berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 untuk capaian Indikator Kinerja Utama adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU). Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 100% atau katagori "**Sangat memuaskan**" sebagaimana tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA									
No	IKU	Satuan	Capaian 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 - 2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target akhir 2023	Capaian 2022	Capaian kinerja s/d 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Risiko Bencana	Angka	110,02%	192,08	236,83	81,11 %	192,08	236,83	81,11 %

Pada tabel di atas Kabupaten Temanggung memiliki Indeks Risiko Bencana sebesar 236,83 pada tahun 2023 dengan katagori kerawanan bencana di kelas Risiko **tinggi**, ini dikarenakan

Kabupaten Temanggung sendiri memiliki kerawanan bencana yang cukup tinggi karena kontur wilayah yang berbukitan, lereng terjal, struktur tanah labil dan banyaknya Kawasan/Desa rawan bencana yang berada di Kabupaten Temanggung. Terutama pada tahun 2023 ini kejadian bencana cukup besar dan banyak terutama di bencana kekeringan, banyak Masyarakat yang terdampak oleh musim kemarau yang cukup Panjang sehingga krisis air bersih di alami Masyarakat terutama di daerah yang minim dengan air bersih. BPBD sendiri melakukan droping air bersih ke Masyarakat selain menggunakan anggaran dari pemerintah, banyak CSR seperti dari Perusahaan swasta, organisasi, relawan yang memberikan bantuan kepada Masyarakat yang terdampak kekeringan. Total sekitar 192 lokasi kekeringan yang melanda Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 ini. Tahun 2022 total kejadian bencana di Kabupaten Temanggung sebanyak 317 kejadian, sedangkan pada tahun 2023 ini sebanyak 432 kejadian bencana yang terjadi dan didominasi oleh bencana kekeringan. Nilai indeks risiko bencana pada tahun 2023 tidak mencapai target dikarenakan tingkat kejadian bencana yang cukup tinggi. Selain dari faktor tingginya kejadian di Kabupaten Temanggung, angka capaian tersebut juga dipengaruhi dengan adanya penghitungan yang masih belum sesuai/minimal mendekati kriteria bencana yang mengacu pada BNPB.

Perhitungan nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten, diukur dengan beberapa indikator yang ada untuk menentukan nilai tersebut. Indeks Risiko Bencana ini sangat berpengaruh kepada tiga indikator penentuan penghitungan Indeks Risiko Bencana yaitu :

a. Kerawanan

Merupakan indikator yang menjelaskan tentang Kawasan rawan bencana yang berada di wilayah suatu Kabupaten/Kota, sehingga semakin banyak kerawanan Kawasan disuatu Kabupaten/Kota maka akan berpengaruh juga terhadap tingginya nilai Indeks Risiko Bencana yang ada.

b. Kapasitas

Merupakan indikator mitigasi bencana yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk memperkuat Kawasan dalam menanggulangi bencana dengan cara membentuk desa Tangguh bencana, pelatihan, sosialisasi, simulasi, pemasangan Early Warning Sistem (EWS), Plank Evakuasi dan mitigasi lainnya untuk menambah kapasitas penanggulangan bencana daerah.

c. Bencana

Merupakan indikator yang menjelaskan banyak kejadian bencana di suatu Kawasan Kabuten/Kota, sehingga semakin banyaknya kejadian bencana juga akan semakin tinggi nilai Indek Risiko Bencana pada suatu Kabupaten/Kota.

Pada table di atas dapat disimpulkan bahwa capaian indicator kinerja utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pencapaian nilai Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung sebesar 236,83 dari target sebesar 192,08 pada tahun 2023, target yang ada tidak tercapai dikarenakan tingginya kejadian bencana pada tahun 2023 terutama bencana kekeringan.
- 2) Pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana pada tahun 2023 sudah meningkat secara signifikan melalui program “Sekolah Kebencanaan” dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA), serta kegiatan Kecamatan Tangguh Bencana (KENCANA) yang tahun 2023 ini diselenggarakan di Kecamatan Bejen dan Kecamatan Bansari, selain itu program lain yang dijalankan pada Tahun 2023 ada satuan Pendidikan aman bencana, target mitigasi yang ada adalah sekolah-sekolah di Kabupaten Temanggung.

Program yang harus dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejumlah 1 program dengan 9 indikator program dan 1 indikator sasaran.

Program penanggulangan bencana diukur dengan satu indikator sasaran yaitu Indeks Risiko Bencana. Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana maka semakin bagus klasifikasi kerentanan yang ada. Rumus penghitungan indeks risiko bencana (IRB) adalah :

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Hazard adalah dihitung berdasarkan rata-rata dari tingkat bahaya berupa data frekuensi dari bahaya alam seperti banjir, longsor, gempa bumi, gunung Meletus, dan lain-lain.

Vulnerability atau kerentanan diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi fisik dan lingkungan dan kerentanan suatu wilayah di Kawasan rawan bencana pada suatu Kabupaten/Kota.

Capacity adalah kemampuan yang dilakukan dengan menggunakan metode penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi kelembagaan, sistem peringatan dini, Pendidikan dan pelatihan ketrampilan, mitigasi bencana serta sistem kesiapsiagaan. Indeks Risiko Bencana dapat dipergunakan sebagai perbandingan tingkat risiko bencana antar daerah. Secara lebih mendalam indeks risiko bencana dengan kategori Risiko Bencana yakni rendah, sedang dan tinggi, dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak, terutama pemerintah daerah untuk melakukan analisa dasar penyusunan kebijakan, kelembagaan, dan perencanaan pembangunan.

Penilaian Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait risiko bencana tiap-tiap Kabupaten/Kota di Indonesia sesuai dengan bahaya yang dimiliki

pada masing-masing Kabupaten/Kota. Klasifikasi nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Klasifikasi Kelas Risiko Bencana Dari BNPB

No	Kelas Risiko	Nilai Kelas Risiko
1	2	3
1	Rendah	<13
2	Sedang	13 – 144
3	Tinggi	>144

Ada perbedaan metode perhitungan Indeks Risiko Bencana yang dilakukan oleh Kabupaten/Kota dengan Nasional (BNPB). Adapun perhitungan yang didapat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perhitungan Indeks Risiko Bencana Kabupaten dengan Provinsi Jawa Tengah atas Analisa BNPB

Sumber Data	Tahun					Kategori Risiko Bencana
	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7
BNPB						
Provinsi Jawa Tengah	144,91	132,99	125,73	115,38	109,01	Sedang
Kabupaten Temanggung	143,2	134,51	121,33	110,38	116,84	Sedang
BPBD Menghitung sendiri						
RPJM Perubahan Th 2019 - 2023	n.a	n.a	251,07	174,59	236,83	Tinggi



Gambar 3.1
Grafik Indeks Risiko Bencana Kab. Temanggung

Dari Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2023, perhitungan Indeks Risiko Bencana Kabupaten Temanggung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung mendapatkan skor sebesar **236,83**, dengan demikian Kabupaten Temanggung sendiri memiliki kelas risiko bencana dengan katagori **tinggi**. Berbeda halnya dengan hasil perhitungan dari BNPB di tahun 2023 nilai IRB Kabupaten Temanggung ada pada level **Sedang** atau ada pada angka **116,84**. Apabila dibandingkan dengan Indek Resiko Bencana (IRB) Tingkat Provinsi Jawa Tengah masih tergolong seimbang dengan angka **IRB Jawa tengah ada pada angka 109,01**. Tinggi rendahnya angka IRB di Kabupaten Temanggung masih ada pada angka dengan katagori tinggi karena sebagai pengukur sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan APBD sarana dan prasana dan kapasitas SDM yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung yang ada. Adapun perbandingan dasar yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Rawan Bencana

Data rawan bencana dihitung dengan jumlah kejadian yang dilaporkan oleh masyarakat dan di assesment dan ditindak lanjuti/ditangani.

2. Jumlah Kejadian Bencana.

Kenaikan angka indeks risiko bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipicu oleh faktor tingginya kejadian bencana di Kabupaten Temanggung pada Tahun 2023 ini oleh kekeringan, dikarenakan musim kemarau yang cukup Panjang.

3. Jumlah Mitigasi

Upaya mitigasi bencana yang dilakukan BPBD Kabupaten Temanggung seperti pelatihan, simulasi, plank evakuasi, pembentukan Destana

Dari sisi kejadian bencana, penanganan terbanyak di tahun 2023 adalah pada jenis bencana kekeringan dengan 212 kejadian/titik kekeringan disusul dengan kejadian tanah longsor 138 kejadian kemudian angin kencang/angin puting beliung 63 kejadian, banjir 10 kejadian, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 5 kejadian, gempa dan cuaca ekstrem masing-masing 2 kejadian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis bencana yang terjadi di Kabupaten Temanggung tahun 2023 didominasi oleh jenis bencana kekeringan dan tanah longsor. Dari seluruh kejadian bencana di tahun 2023, dampak yang terjadi adalah kerusakan rumah sejumlah 400 rumah, infrastruktur 50 buah, sosial 14, ekonomi 13 dan lintas sektor 11.

Gambaran detail kejadian bencana di tahun 2023 di Kabupaten Temanggung kami sajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Data Kejadian Bencana Kabupaten Temanggung
Tahun 2023

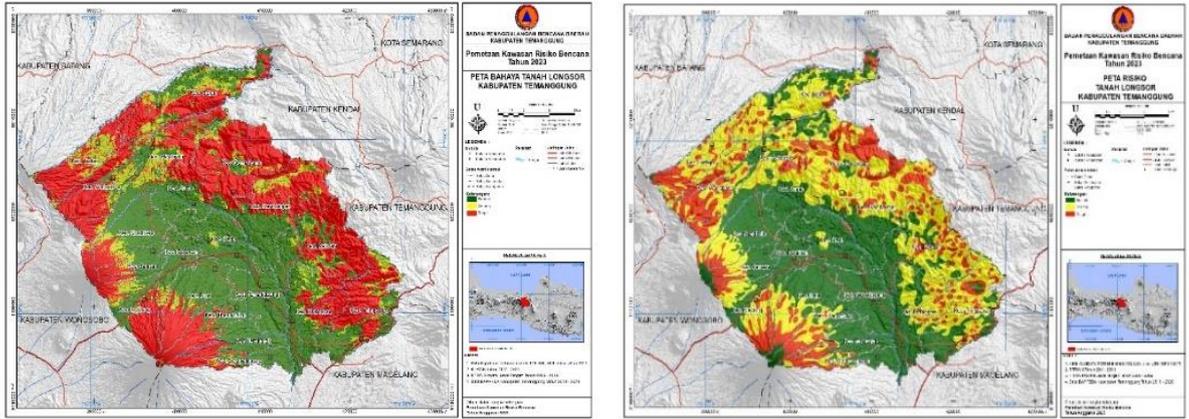
KECAMATAN	Banjir	Cuaca eks	Longsor	Gempa	Kekeringan	Erupsi GA	Angin	Karhutla	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bansari	-	-	7	-	-	-	1	-	8
Bejen	-	-	6	-	12	-	1	1	20
Bulu	1	-	1	-	22	-	6	-	30
Candiroto	-	-	4	-	2	-	1	1	8
Gemawang	-	-	14	-	7	-	1	-	22
Jumo	-	-	4	1	1	-	2	-	8
Kaloran	-	1	36	-	16	-	5	-	58
Kandangan	-	-	6	-	24	-	5	1	36
Kedu	1	-	3	1	-	-	9	-	14
Kledung	-	-	3	-	-	-	2	1	6
Ngadirejo	1	-	8	-	66	-	4	-	79
Parakan	3	-	6	-	-	-	2	-	11
Pringsurat	3	-	2	-	-	-	5	-	10
Selopampang	-	1	17	-	20	-	4	-	42
Temanggung	-	-	2	-	16	-	1	-	19
Tembarak	1	-	9	-	-	-	8	-	18
Tlogomulyo	-	-	2	-	8	-	2	-	12
Tretep	-	-	4	-	18	-	3	1	26
Wonobooyo	-	-	3	-	-	-	1	-	4
JUMLAH	10	2	138	2	212	-	63	5	432



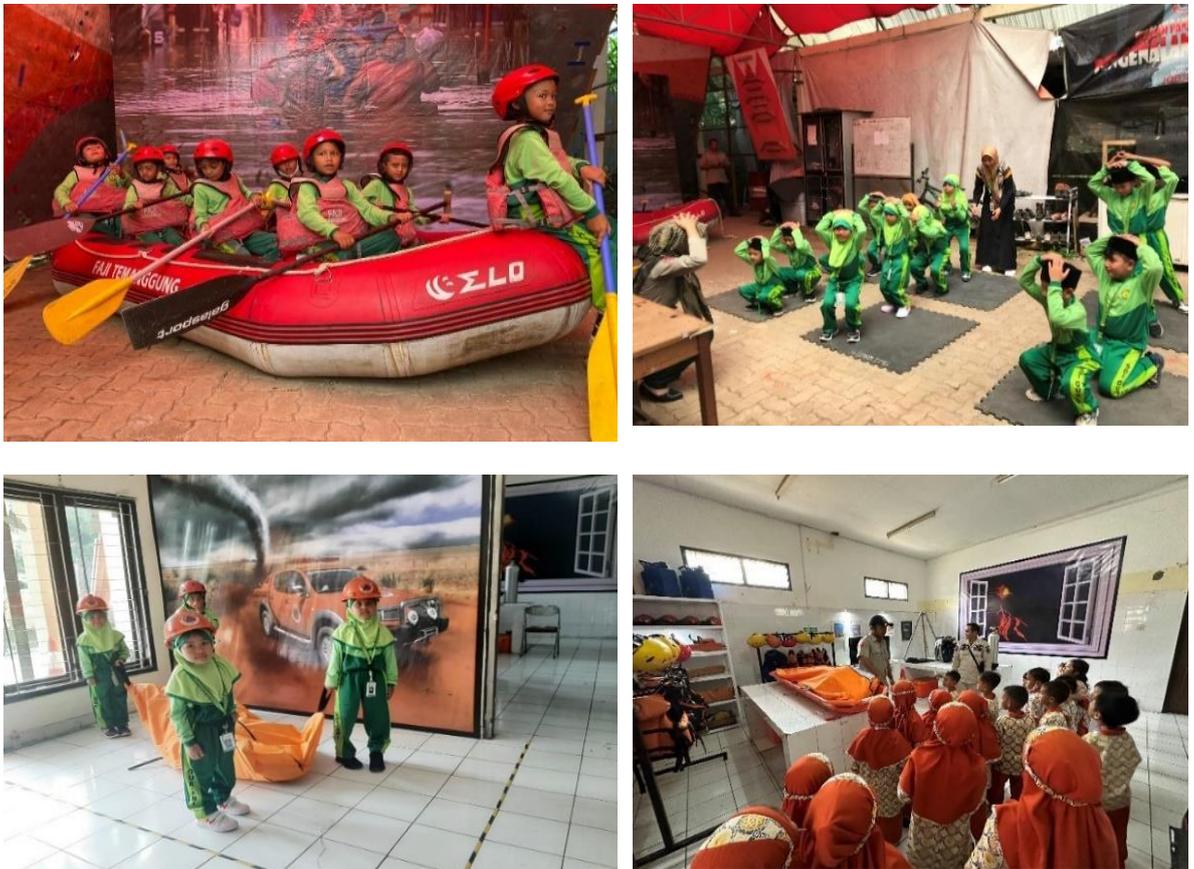
Gambar 3.2
Grafik Kejadian Bencana Kab. Temanggung

Pada gambar dan tabel diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung baru menentukan nilai Indeks Risiko Bencana pada tahun 2021 dikarenakan penentuan indikator-indikator penghitungan Indeks Risiko Bencana pada tahun tersebut.

Beberapa kegiatan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2023 untuk mencapai nilai dari Indeks Risiko Bencana berupa kegiatan sosialisasi, kegiatan pelatihan, kegiatan sekolah kebencanaan, kegiatan diklat, penyusunan peta kajian risiko bencana berupa kerentanan bahaya dan risiko, pelatihan personil penanganan kebencanaan, pemberian logistik penyelamatan (logistik permakan dan non permakan), koordinasi lintas sektor.



Gambar 3.3
Penyusunan Peta Risiko, Bahaya dan Kerentanan
Kabupaten Tembung Tahun 2023



Gambar 3.4
Sekolah kebencanaan

Program sekolah kebencanaan sudah berjalan sekitar 2-3 tahun, tujuannya adalah mengenalkan secara dini mengenai bahaya bencana, jenis bencana beserta tata cara penanggulangan bencana nya seperti

apa, sehingga sejak dini anak-anak di usia sekolah ini sudah mengenal dan memiliki wawasan dalam pencegahan serta kesiapsiagaan terhadap bencana. Sekolah kebencanaan sendiri dilakukan di Kantor BPBD Kabupaten Temanggung disertai berbagai fasilitas yang ada.



*Gambar 3.5
Pelatihan gabungan personil penanganan bencana*

Pelatihan gabungan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan personil penanggulangan bencana dalam menghadapi bencana. Keterampilan personil penanganan bencana akan di asah dalam pelatihan gabungan ini. Kesiapsiagaan daerah dalam penanganan bencana menjadi prioritas dikarenakan nantinya akan menjadi tolok ukur indeks ketahanan daerah pada masing-masing daerah terutama pemerintah daerahnya.



*Gambar 3.6
Koordinasi lintas sektor dan stakeholder terkait*

Adapun tujuan koordinasi lintas sektor dan stakeholder terkait adalah membuat kebijakan-kebijakan strategis yang nantinya akan digunakan pemerintah daerah guna pengambilan Keputusan yang ada. Dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 di pengaruhi oleh Faktor Penghambat, Pendorong dan Tindak Lanjut dapat dilihat pada tabel 3.5 Sebagai berikut :

Tabel 3.6
 Faktor Pendorong ,Penghambat dan Tindak Lanjut Tercapainya Indikator
 Kinerja Utama BPBD Kabupaten Temanggung

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
Adanya peran serta pemerintah daerah yang berfokus dalam melakukan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta terlatihnya Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam Upaya penanggulangan bencana	Pemerintah daerah belum optimal dalam penanggulangan bencana terutama pembuatan dokumen kajian risiko bencana sehingga daerah rawan bencana di kabupaten temanggung belum di tentukan melalui sebuah kajian yang legal/sah	Meningkatkan peran serta pemerintah dan Masyarakat dalam penanggulangan bencana secara bersama-sama serta melakukan perhitungan indeks risiko bencana didasari oleh kajian risiko bencana yang ada

Dari Tabel 3.5 dapat dijabarkan lebih rinci faktor penghambat kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung adalah ketersediaan dokumen KRB, dalam hal ini ketersediaan Dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sangat penting sebagai dokumen induk untuk kebijakan penanggulangan bencana seperti telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Temanggung BAB. VI Pasal 29 ayat 4 bahwa :

Informasi kebencanaan, basis data (*database*) dan peta kebencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi untuk:

- a) menyusun kebijakan dan strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
- b) mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan, dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
- c) memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
- d) pengembangan sistem peringatan dini;

- e) mengetahui bahaya bencana, resiko bencana, dan kerugian akibat bencana; dan
- f) menjalankan pembangunan yang beradaptasi pada bencana dan menyiapkan masyarakat hidup selaras dengan bencana.

Selain itu, penyusunan kajian risiko bencana juga merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018

Sasaran Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 adalah Meningkatnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, merupakan sasaran yang nantinya lebih mengerucut kedalam pelatihan, sosialisasi dan informasi kepada masyarakat. Selain itu juga di dorong dengan peningkatan sumber daya petugas dalam agar memiliki kapasitas yang lebih baik lagi dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi dan tersruktur. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang memadai juga menjadi faktor pendorong pada saat penanggulangan bencana yang ada. Adapun Target pencapaian sasaran BPBD Kabupaten Temanggung, pada tahun 2023 tercapai 100% yang merupakan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (SPM) sub urusan bencana, dapat dilihat pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA									
No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 – 2023		
				Target	Realisasi	Capaian %	Target akhir 2023	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
1	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100

SASARAN STRATEGIS : MENINGKATNYA KAPASITAS KELEMBAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA									
N o.	Indikator Kinerja Program	Sat uan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019 – 2023		
				Tar get	Reali sasi	Capaian %	Target akhir 2023	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
2	Warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100

Pada tabel capaian indikator sasaran diatas bisa dilihat bahwa capaian pada tahun 2022 pada semua layanan mencapai 100% sesuai dengan target sasaran yang ditentukan baik pencapaian sasaran dan pencapaian Standar pelayanan Minimal SPM Sub urusan bencana.

2. Capaian Indikator Kinerja Program

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa indikator program yang dijalankan pada Tahun 2023 pada program Penanggulangan Bencana. Adapun indikator program yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana;
- 2) Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
- 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

capaian indikator kinerja pada Badan Penanggulangan bencana daerah Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Capaian Indikator Kinerja Program Penanggulangan Bencana
Tahun 2023

Sasaran Program Penanggulangan Bencana								
Indikator Kinerja Program	Satuan	Realisasi 2022	Tahun 2023			Renstra 2019-2023		
			Target	Realisasi	Capaian %	Target akhir 2023	Capaian 2023	Capaian kinerja s/d 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Persentase warga negara yg memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase warga negara yg memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan thdp bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase warga negara yg memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100

Sasaran program tersebut merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan mitigasi bencana. Penjabaran capaian indikator program yang ada adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara yang memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana

Indikator program ini merupakan layanan yang diberikan kepada masyarakat tentang informasi rawan bencana yang berada di Kabupaten Temanggung, dari total 289 Desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung sebanyak 217 desa rawan bencana. Dengan demikian upaya penyampaian informasi rawan bencana untuk warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana dirasa sangat perlu untuk kesiapsiagaan masyarakat yang ada di Kawasan rawan bencana. Pencapaian layanan

informasi rawan bencana pada tahun 2023 bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2022	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Persentase warga negara yg memperoleh layanan informasi rawan bencana	598.240 Jiwa	606.144 Jiwa	606.144 Jiwa	100%

Pada tahun 2023 capaian persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana mencapai 100%, layanan informasi rawan bencana tersebut memfasilitasi seluruh masyarakat di Kawasan rawan bencana, adapun informasi yang diberikan melalui media sosial baik dari Instagram BPBD, WA grup relawan BPBD dan sebagainya.

Pada indikator program ini Tahun 2023 anggaran sebesar Rp 20.000.000 yang digunakan untuk pembuatan peta rawan bencana, peta risiko bencana dan peta kerentanan bencana, walaupun seharusnya dokumen kajian risiko bencana ini bukan hanya peta saja yang ada akan tetapi dengan kajiannya. Adapun realisasi anggaran yang ada sebesar Rp 19.919.200 (99,60%) dari total anggaran, sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp 80.800 (0,4%) dari total anggaran yang ada.

2. Warga negara yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

Layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana adalah upaya mitigasi bencana yang dilakukan oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung dalam membentuk masyarakat yang Tangguh dalam menghadapi bencana. Layanan ini berisikan tentang layanan pelatihan, simulasi, sosialisasi dan pembentukan Desa Tangguh Bencana serta melatih masyarakat sejak dini dalam menghadapi bencana secara mandiri. Pada tahun 2023 ini program yang diunggulkan untuk pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan melalui sekolah kebencanaan dan program satuan Pendidikan aman bencana, Dimana pelatihan dan sosialisasi sendiri diberikan kepada anak-anak di dunia Pendidikan agar anak-anak sendiri sejak dini sudah mengenal bahaya dan risiko bencana yang terjadi, selain itu juga diberikan ilmu bagaimana tatacara melakukan pertolongan dan upaya pencegahan secara dini untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh kejadian bencana yang terjadi. Pencapaian kinerja layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.10
Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2022	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	413.779 Jiwa	413.779 Jiwa	413.779 Jiwa	100%

Pada tahun 2023 pencapaian indikator kinerja tersebut mencapai 100 %, pelayanan sendiri diberikan kepada warga negara yang berada di Kawasan rawan bencana. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan ini dilakukan untuk membentuk masyarakat yang Tangguh terhadap bencana.

Anggaran yang ada pada tahun 2023 indikator tersebut sebesar Rp 50.000.000, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp 49.621.705 (99,24%) sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp 378.295 (0,76%).

3. Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan layanan evakuasi dan respon cepat yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada saat terjadinya bencana alam yang ada. Layanan sendiri berupa evakuasi pada saat terjadinya bencana yang menimbulkan korban ataupun tidak, pemberian bantuan baik bantuan berupa bahan bangunan rumah (BBR)

Capaian indikator layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi

Indikator Kinerja Program	Realisasi 2022	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian %
1	2	3	4	5
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	70 jiwa	83 jiwa	83 jiwa	100%

Data diatas merupakan data korban jiwa dengan katagori luka-luka, meninggal dan mengungsi. Sedangkan jumlah seluruh jiwa yang terdampak bencana alam dari semua jenis bencana sebesar

50.379 jiwa. Total kejadian bencana pada tahun 2023 sebesar 432 kejadian bencana alam. Ini meningkat jauh dari tahun 2022 sebesar 317 kejadian bencana. Pada situasi seperti ini sinergitas pemerintah sangat dibutuhkan untuk menangani kejadian bencana.

Anggaran pada tahun 2023 untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebesar Rp 1.604.180.300, (*satu miliar enam ratus empat juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah*) dengan serapan anggaran/realisasi keuangan sebesar Rp 1.021.451.501,- (*satu miliar dua puluh satu juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus satu rupiah*) (63,67%), sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp 582.728.799 (36,33%) dalam hal terjadi efisiensi anggaran yang cukup besar, karena pada anggaran indikator ini Sebagian besar sifatnya adalah persediaan, sehingga Ketika tidak ada kejadian bencana maka anggaran juga tidak akan digunakan. Gaji/honor satgas penanggulangan bencana juga masuk kedalam anggaran tersebut, selain itu untuk pengadaan bahan bangunan rumah (BBR) untuk bantuan rumah yang terkena bencana juga masuk kedalam anggaran tersebut. Untuk efisiensi sumber daya sendiri bahwa indikator kinerja tersebut bisa tercapai sebesar 100% dengan penggunaan anggaran sebesar 63,67% sehingga ada efisiensi sumber daya sebesar 36,33%.

Dalam melaksanakan indikator program, ada beberapa faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat pencapaian indikator kinerja yang ada serta tindak lanjut dan rekomendasi yang akan dilakukan bisa di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12
Faktor penghambat, faktor pendorong dan tindak lanjut

FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	TINDAK LANJUT
<ul style="list-style-type: none"> ➤ BPBD memiliki kapasitas aparatur penanggulangan bencana yang memadai ➤ Sinergitas pentahelix yang cukup tinggi dengan stake holder terkait ➤ Ketersediaan dokumen peta kerentanan, risiko dan bahaya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tingginya kejadian bencana di Kabupaten Temanggung ➤ Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ➤ Belum tersedianya dokumen pokok kebencanaan yang idelanya menjadi dokumen penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung (dokumen KRB) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Peningkatan kapasitas aparatur penanggulangan bencana melalui pelatihan kebencanaan ➤ Melakukan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Masyarakat di Kawasan rawan bencana ➤ Mengusulkan kepada pemerintah daerah terkait penyusunan dokumen pokok yaitu kajian risiko bencana ➤ Updating Standar Operasional Prosedur (SOP)

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dalam rangkai mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp 4.165.541.004,- (Empat milliard serratus enam puluh lima juta lima ratus empat puluh satu ribu empat rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 3.276.855.861,- (*tiga milliard dua ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh satu rupiah*) 78,67% dari total anggaran yang

diberikan. Alokasi dan realisasi dari belanja operasi dan belanja modal secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dengan rincian sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai	: 1.468.827.244
2) <u>Belanja Barang dan Jasa</u>	: <u>2.569.758.400</u>
Jumlah	: 4.038.585.644

b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 124.543.800 atau 98,18% dari anggaran sebesar Rp 126.955.360

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai strategis yang ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan penunjang urusan Pemerintah Daerah/Kabupaten dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut :

*Tabel 3.13
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2023*

Program/kegiatan/ subkegiatan	Anggaran	Realisasi		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	2	3	4		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANTIBUMLINMAS	4.165.541.004	3.276.855.861	78,67	888.685.143	21,33
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.976.603.444	1.945.667.647	98,43	30.935.797	1,57
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.468.827.244	1.453.740.672	98,97	15.086.572	1,03
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.468.827.244	1.453.740.672	98,97	15.086.572	1,03
Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.335.000	81.130.600	99,75	204.400	0,25
1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.000.000	6.000.000	100	0	0,00

Program/kegiatan/ subkegiatan	Anggaran	Realisasi		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	2	3	4		
2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.000.000	11.979.500	99,83	20.500	0,17
3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	7.000.000	100	0	0,00
4 Fasilitas Kunjungan Tamu	26.335.000	26.194.300	99,47	140.700	0,53
6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	29.956.800	99,86	43.200	0,14
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297.941.200	282.455.065	94,80	15.486.135	5,20
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	4.985.000	99,70	15.000	0,30
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.000.000	26.361.824	73,23	9.638.176	26,77
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.000.000	7.995.000	99,94	5.000	0,06
4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	248.941.200	243.113.241	97,66	5.827.959	2,34
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.500.000	128.341.310	99,88	158.690	0,12
1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	102.000.000	101.928.310	99,93	71.690	0,07
2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.500.000	21.440.000	99,72	60.000	0,28
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	4.973.000	99,46	27.000	0,54
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.188.937.560	1.331.188.214	60,81	857.749.346	39,19
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	19.919.200	99,60	80.800	0,40
1 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	19.919.200	99,60	80.800	0,40

Program/kegiatan/ subkegiatan	Anggaran	Realisasi		SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
1	2	3	4		
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	50.000.000	49.621.705	99,24	378.295	0,76
1 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	39.949.475	99,87	50.525	0,13
2 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	10.000.000	9.672.230	96,72	327.770	3,28

2. Analisa Efisiensi

Untuk mencapai Sasaran dan Indikator Program Penanggulangan Bencana, pada Tahun 2023 didukung anggaran total sebesar Rp 4.165.541.004 untuk program penunjang urusan pemerintah dan program penanggulangan bencana dengan realisasi anggaran sebesar Rp 3.276.855.861 (78,67%), sehingga efisiensi anggaran sebesar Rp 888.685.143 atau (21,33%). Efisiensi sumber daya, untuk indikator kinerja semua tercapai 100% akan tetapi anggaran tidak terealisasi sebesar 100%, untuk program penunjang pemerintah indikator program tercapai 100% kegiatannya akan tetapi anggaran terealisasi sebesar 98,43% sehingga ada efisiensi sumber daya sebesar 1,57%. Untuk program penanggulangan bencana indikator program tercapai 100% seluruhnya, akan tetapi anggaran terealisasi sebesar 60,81%, sehingga ada efisiensi sumber daya sebesar 39,19%

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi dan penghargaan baik dari provinsi atau nasional, pada Tahun 2023 di Tahun 2023 dalam rangka BULAN PERINGATAN RISIKO BENCANA NASIONAL Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung berpartisipasi mengikuti lomba yel-yel yang diadakan oleh BNPB, semua BPBD Kabupaten/Kota mengikuti lomba yang di selenggarakan tersebut. BPBD Kabupaten Temanggung berhasil

memperoleh restasi sebagai Juara Favorit, yang penerimaan penghargaan di selenggarakan di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Tabel 3.14
Prestasi dan penghargaan
Tahun 2023

No	Nama Penghargaan	Tahun Penghargaan	Tingkat
1	Juara Yel-Yel terfavorit dalam rangka bulan peringatan risiko bencana di Kendari Sulawesi Tenggara	2023	Nasional



Gambar 3.6
Penerimaan piagam penghargaan
Juara terfavorit lomba yel-yel dalam rangka Bulan Peringatan Risiko Bencana
di Kendari Sulawesi Tenggara

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA BPBD

BPBD Kabupaten Temanggung merupakan PD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana, Agar pelaksanaan tugas tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan sumber daya manusia, sumber dana dan sarana prasarana seefektif dan seefisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa BPBD Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **"Sangat Memuaskan"** yaitu kinerja dengan nilai **100 %**.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja BPBD Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Mengembangkan Sekolah Kebencanaan
2. Peningkatan TRC kebencanaan 24 jam 7 hari (247).
3. Bantuan stimulan Bahan Baku Rumah bagi korban bencana.
4. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam menyusun dan mengendalikan proses penyusunan perencanaan pembangunan.
5. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan.
6. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
7. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan kebijakan;

Strategi tersebut diatas merupakan sasaran yang nantinya akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung guna meningkatkan kinerja Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Strategi tersebut ditentukan dengan melihat kondisi dan keadaan masyarakat yang ada, selain itu agar kerjasama serta kolaborasi lintas sektor dan pentahelix agar tetap berjalan dengan baik untuk urusan penanggulangan bencana di Kabupaten Temanggung. Harapan yang ada strategi peningkatan kinerja tersebut bisa dicapai dan berjalan dengan lancar dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



TOIFUR HADI WURYANTO, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 197107281997031005

